

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Secara internasional pengakuan atas penyandang disabilitas telah dimulai sejak tahun 1980an dan peraturan mengenai persamaan kesempatan penyandang disabilitas sudah ada sejak tahun 1993 dengan pembentukan *rappporteur* khusus untuk memantau perihal disabilitas. Selain itu pula ditetapkan standar internasional anti-diskriminatif dan inklusif yang bersamaan dengan perkembangan gerakan disabilitas lainnya.

Saat ini banyak lembaga pembangunan internasional yang mengadopsi '*right based approach*' atau pendekatan yang berasaskan hak yang menegaskan tentang menghilangkan hambatan fisik, sosial, serta menciptakan desain yang universal. (The United Nations Children's Fund (UNICEF), 2007)

Sedangkan pada tahun 2000 Perserikatan Bangsa Bangsa telah mendeklarasikan *Milenium Development Goals* yang merupakan paradigma pembangunan global. Salah satu agendanya yakni mengupayakan dan memastikan bersama bahwa alokasi dana kepada anak penyandang disabilitas. Hal ini termasuk pendidikan, gedung yang aksesibel, tenaga pengajar, dan tenaga profesional lainnya.

Sekarang ini di Indonesia setiap warganya berhak dan wajib untuk mendapatkan pendidikan sesuai yang tertulis dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perihal hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah di bidang pendidikan.

Selain itu pada UU nomor 20 tahun 2003 perihal sistem pendidikan nasional yakni penyelenggaraan pendidikan yang wajib memegang prinsip-prinsip pendidikan yang diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak bersifat diskriminatif yakni dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu pula dalam proses pendidikan harus diadakannya proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang dapat membangun kemauan, keteladanan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik melalui pengembangan budaya menulis, membaca, dan berhitung bagi setiap warga masyarakat melalui keikutsertaan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pada UU nomor 20 tahun 2003 pasal 5 bahwa setiap warga negara dengan berbagai keterbatasan baik secara geografis, sosial, fisik dan mental berhak mendapatkan pendidikan khusus. Yang kemudian dibahas secara khusus pada pasal 32 mengenai pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, bahwa pendidikan khusus merupakan pemberian pendidikan bagi peserta didik yang memiliki berbagai tingkat kesulitan baik secara fisik, mental, emosional, dan atau kecerdasan sosial dan memiliki bakat istimewa dalam mengikuti proses pembelajaran.

Sekolah Luar Biasa merupakan salah satu tempat yang menyediakan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang menyediakan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang menyediakan pelayanan khusus dalam hal pendidikan dengan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan pengguna berkebutuhan khusus tersebut.

Menurut jenis kedisabilitasnya Sekolah Luar Biasa yang ada di Indonesia berdasarkan penyelenggaraan pada semua jenjang untuk tiap jenis ketunaannya adalah sebagai berikut :

- **SLB A yakni sekolah bagi anak penyandang tunanetra**
- **SLB B yakni sekolah bagi anak penyandang tunarungu wicara**
- SLB C yakni sekolah bagi anak penyandang tunagrahita
- **SLB D yakni sekolah bagi anak penyandang tunadaksa**
- SLB E yakni sekolah bagi anak penyandang tunalaras
- SLB G yakni sekolah bagi anak penyandang tunaganda

Saat ini jenis Sekolah Luar Biasa yang menampung lebih dari satu kategori tersebut dalam satu sekolah masih jarang. Mayoritas hanya berfokus pada salah satu tipe Sekolah Luar Biasa. Sekolah Luar Biasa yang menampung hampir seluruh tipe ketunaan untuk saat ini masih ditemukan pada Sekolah Luar Biasa milik pemerintah yang hanya terdapat satu hingga dua sekolah pada tiap kotanya.

Menurut Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jumlah Sekolah Luar Biasa di Kota Pekalongan hanya terdapat satu kompleks Sekolah Luar Biasa milik pemerintah yang berstatus SDLB dengan lokasi yang jauh dari pusat kota. Jumlah ini terbilang masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah Sekolah Luar Biasa di Surakarta yang mencapai 17 buah dilihat dari segi cakupan wilayah yang lebih sempit dibandingkan Kota Pekalongan.

KOTA	JUMLAH SEKOLAH LUAR BIASA	LUAS WILAYAH
Pekalongan	1	836,13 km <sup>2</sup>
Semarang	18	946,86 km <sup>2</sup>
Batang	1	788,95 km <sup>2</sup>
Pemalang	2	1011,90 km <sup>2</sup>
Surakarta	17	44,03 km <sup>2</sup>

Tabel 1. 1 Jumlah sekolah dan luas wilayah  
(Sumber: DAPODIK DASMEN dan BPS)

KOTA	ANAK DENGAN KEDISABILITASAN	PENYANDANG DISABILITAS
Pekalongan	1985	7214
Semarang	353	1142
Batang	813	2611
Pemalang	507	1009
Surakarta	379	1102

Tabel 1. 2 PMKS 2016  
(Sumber: Dinas Sosial Jawa Tengah)

Melalui kedua tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah Sekolah Luar Biasa yang ada di Kota Pekalongan saat ini masih sangat kurang memadai dilihat dari perbandingan luas wilayah dan jumlah anak disabilitas.

Selain itu pula menurut data Dinas Sosial Jawa Tengah jumlah anak penyandang disabilitas terbanyak terdapat di Kota Pekalongan.

Secara rinci jumlah anak penyandang disabilitas sebagai berikut :

2013						
KOTA	TUNA DAKSA	TUNA NETRA	TUNARUNGU WICARA	TUNA GRAHITA	TUNA LARAS	TUNA GANDA
Pekalongan	427	88	222	116	47	49
Semarang	724	185	320	144	31	68
Batang	367	85	96	140	50	107
Pemalang	969	263	454	553	174	216
Surakarta	120	30	63	116	19	42
<b>TOTAL</b>	<b>2607</b>	<b>651</b>	<b>1155</b>	<b>1401</b>	<b>395</b>	<b>645</b>
2014						
KOTA	TUNA DAKSA	TUNA NETRA	TUNARUNGU WICARA	TUNA GRAHITA	TUNA LARAS	TUNA GANDA
Pekalongan	418	109	213	292	80	118
Semarang	724	185	308	264	89	106

Batang	332	87	113	156	58	93
Pemalang	969	242	454	553	174	216
Surakarta	82	36	83	83	26	71
<b>TOTAL</b>	<b>2525</b>	<b>659</b>	<b>1171</b>	<b>1348</b>	<b>427</b>	<b>604</b>

Tabel 1. 3 Rincian anak disabilitas 2013-2014  
(Sumber:Dinas Sosial Jawa Tengah)

Menurut Dinas Sosial tahun 2013-2014 diatas didapatkan jumlah anak penyandang disabilitas terbanyak berada di Kota Pekalongan dan sekitarnya yakni penyandang disabilitas fisik yang terdiri dari : tunadaksa, tunarungu wicara, dan tunanetra. Yang dimana terdapat kenaikan jumlah penyandang dari tahun 2013 hingga 2014.

Maka dari itu dibutuhkan wadah bagi para anak yang menyandang tunadaksa, tunarungu wicara, dan tunanetra khususnya di Kota Pekalongan guna meningkatkan partisipasi pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan adanya asrama pada Sekolah Luar Biasa merupakan fasilitas yang mendukung kemudahan bagi peserta didik yang bertempat tinggal jauh dari sekolah.

## 1.2 Pertanyaan Masalah Desain

Rumusan masalah yang terdapat pada pemrograman perencanaan proyek ini adalah :

1. Bagaimana penataan ruang di Sekolah Luar Biasa dengan fasilitas penunjang asrama yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik tunanetra, tunarungu wicara, dan tunadaksa.
2. Bagaimana menata aksesibilitas ruang di bangunan Sekolah Luar Biasa yang aman, nyaman, dan tepat fungsi bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

3. Apasaja kebutuhan respon arsitektural yang dapat diterapkan bagi pengguna berkebutuhan khusus dan pengguna normal lainnya pada Sekolah Luar Biasa.

### **1.3 Tujuan**

1. Menciptakan tatanan ruang di Sekolah Luar Biasa dengan fasilitas penunjang asrama yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik tunanetra, tunarungu wicara, dan tunadaksa.
2. Menata aksesibilitas ruang di bangunan Sekolah Luar Biasa yang aman, nyaman, dan tepat fungsi bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
3. Menerapkan kebutuhan respon arsitektural yang dapat diterapkan bagi pengguna berkebutuhan khusus dan pengguna normal lainnya pada Sekolah Luar Biasa.

### **1.4 Manfaat**

Kemudian manfaat yang ingin dicapai yakni :

1. Manfaat Praktis

Diharapkan melalui pemrograman ini dapat digunakan sebagai rekomendasi pembangunan sekolah khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus terutama bagi peserta didik tunanetra, tunarungu wicara, dan tunadaksa yang dapat mengakomodir peserta didik dengan cakupan yang lebih luas.

2. Manfaat Akademis

Sedangkan manfaat secara akademis, diharapkan dapat menjadi referensi dan teori-teori yang relevan bagi para akademisi khususnya pada bidang arsitektur.

## 1.5 Sistematika Pembahasan

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Berisi mengenai uraian latar belakang *urgensitas* kebutuhan fungsi bangunan yakni Sekolah Luar Biasa yang direncanakan serta uraian latar belakang penetapan wilayah atau lokasi yang dipilih. Pada bab ini juga menjelaskan hubungan latar belakang terhadap permasalahan proyek desain secara umum.

### **BAB II. GAMBARAN UMUM SEKOLAH LUAR BIASA BERASRAMA**

Pada bab ini berisi mengenai pengetahuan umum Sekolah Luar Biasa seperti definisi fungsi bangunan, karakteristik bangunan berdasarkan berbagai sumber. Serta berisi uraian mengenai lokasi, jenis ruang dan pengguna bangunan beserta dengan persyaratan yang sesuai dengan fungsi bangunan yang kemudian dapat menentukan besaran ruang.

### **BAB III. PEMROGRAMAN DAN PERUMUSAN MASALAH**

Berisi mengenai analisa-analisa yang bersifat lebih khusus mengenai fungsi bangunan, pengguna bangunan beserta aktivitasnya, site yang digunakan beserta dengan analisa lingkungan sekitar baik alami ataupun lingkungan buatan.

#### **BAB IV. LANDASAN TEORI**

Berisi analisa-analisa mengenai teori-teori yang relevan dengan masalah perencanaan desain yang bersumber dari berbagai sumber baik dri buku atau jurnal.

#### **BAB V. PENDEKATAN DAN LANDASAN PEMROGRAMAN**

Pada bab ini berisi berbagai teori-teori sebagai dasar pemecahan masalah yang ada pada bab sebelumnya, sehingga dalam penyelesaiannya memiliki dasar yang kuat sebagai buktinya.

